

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memuat informasi yang menjelaskan kinerja keuangan dan kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi beberapa syarat yaitu relevan, tepat waktu, dan dapat pula dibandingkan. Dengan dilaksanakannya persyaratan di atas maka sebuah laporan keuangan bermanfaat bagi para penggunanya. Dalam PSAK No.1 Tahun 2013 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan, sedangkan tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Agar informasi tentang laporan keuangan sebuah perusahaan dapat sampai ketangan setiap pihak yang membutuhkan maka laporan keuangan tersebut harus diserahkan dengan tepat waktu. Pentingnya penyelesaian laporan keuangan telah ditekankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam peraturan UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua BAPEPAM No 80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Keputusan tersebut kemudian diperbaharui lagi pada tahun 2012 yaitu melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) Nomor: KEP-431/BL/2012 memutuskan bahwa penyerahaan laporan keuangan yang sudah di audit sebelumnya adalah 3 (tiga) bulan dari berakhirnya tahun buku.

Keterangan OJK tersebut merujuk bahwa laporan keuangan yang diserahkan sebelumnya haruslah sudah di audit oleh auditor. Suatu laporan keuangan yang sudah diperiksa (diaudit) oleh akuntan umum lebih penting, karena laporan tersebut telah dibandingkan atau dicocokkan dengan catatan-catatan akuntansinya oleh akuntan yang bebas (independen) terhadap manajemen perusahaan (Munawir, 2012, hlm. 12). Apabila pada akhirnya terbukti bahwa

Naomi Sianturi, 2019

PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP AUDIT REPORT LAG (Studi pada Perusahaan BUMN Non-Keuangan Tahun 2014 - 2016)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

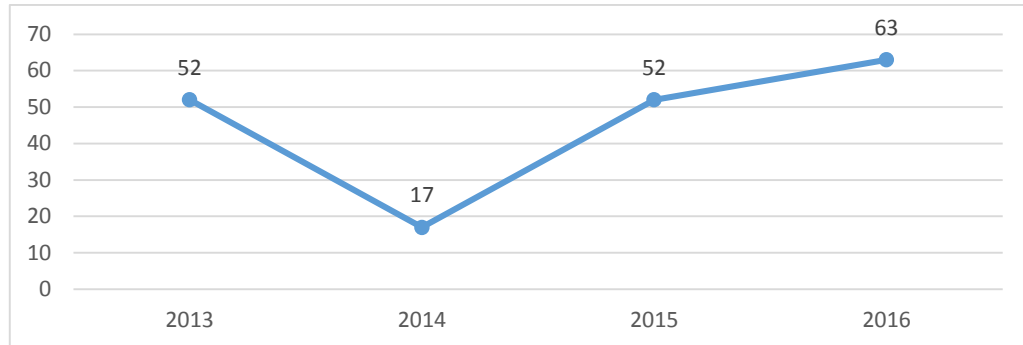
laporan keuangan tersebut tidak benar, auditor dapat dituntut, baik oleh perusahaan bersangkutan maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan dengan dasar bahwa seorang auditor memiliki tanggungjawab jabatan (*professional responsibility*) untuk menjamin kebenaran informasi yang diperiksanya. Jelaslah bahwa seorang auditor bertanggungjawab penuh secara hukum untuk pekerjaan yang dilaksanakannya (Arens, 1991, hlm. 11).

Menurut Kusumawardani (2013) hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan jembatan informasi antara pihak manajemen dengan pihak luar, namun pihak perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar laporan keuangan terlihat lebih baik untuk menarik investor maupun dari pihak luar lainnya. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut (Givoly & Palmon, 1982). Disamping itu, informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasi akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham (Shulthoni, 2012). Keterlambatan tersesebut disebut sebagai *audit report lag*.

Audit Report Lag sering disebut sebagai audit delay. Hal tersebut seperti yang dikemukakan Afify (2009) “... *audit report lag* described in some research as *audit delay*...”. *Audit report lag* didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit (Carslaw dan Kaplan 199).

Menurut Afify (2009) *audit report lag* adalah rentang waktu penyelesaian audit dari tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tercantum dalam lapran audit. Hajiha & Rafiee (2011) mengukur audit delay dilihat dari jumlah hari antara akhir tahun fiskal laporan keuangan hingga diterbitkannya laporan audit independen. Menurut Parameswari (2012) audit delay yang terjadi di Indonesia akan berdampak negatif bagi kelangsungan perusahaan karena lamanya waktu penyelesaian proses audit akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan auditan. Keterlambatan dalam publikasi informasi laporan keuangan akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan

yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Meylisa Iskandar dan Estralita, 2010).



Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah)

Grafik 1. 1 Perusahaan yang Terlambat Publikasi Laporan Keuangan

Dari data diatas keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dan yang paling rendah pada tahun 2014. Hal ini tentunya menjadi masalah besar karena mengingat bahwa laporan keuangan memang haruslah di sampaikan secara terbuka, juga menjadi bahan kekhawatiran sebab OJK lewat keputusan ketua BAPEPAM-LK Nomor:KEP-431/BL/2012 sudah menekankan bahwa laporan keuangan yang sudah di audit harus diserahkan selama 90 hari setelah tutup buku, namun hingga pada tahun 2016 masih terdapat perusahaan yang mengabaikan hal tersebut. Untuk memberikan efek jera maka diberikan sanksi atas keterlambatan tersebut kemudian perusahaan juga dikenai kewajiban untuk membayar denda serta dihentikan sementara perdagangan efek tiap perusahaan yang melanggar aturan.

Permasalahan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dijumpai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan laporan tahunan perusahaan PT Perkebunan Nusantara III diketahui terlambat untuk mempublikasi laporan auditnya untuk tahun 2014. Keterangan tersebut terlihat dari laporan auditnya yang selesai pada tanggal 23 April 2015. Hal tersebut tentunya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tidak hanya itu ditahun berikutnya PT Perkebunan Nusantara III juga masih tetap melakukan kesalahan yang sama. Dimana pada tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara III menyelesaikan laporan auditnya pada tanggal 2 Mei 2016.

BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi di pusat dan daerah harus mampu menciptakan nilai tambah berupa perolehan keuntungan/laba. Hal ini perlu dilakukan, karena sebagian hasil keuntungan yang diperoleh BUMN merupakan salah satu komponen Pendapatan Negara yang tentunya akan mempengaruhi besarnya penerimaan negara. BUMN yang minimal 51% atau seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah diatur berdasarkan UU nomor 19 Tahun 2003.

Maraknya pemberitaan yang terjadi pada BUMN belakangan ini menjadi sebuah ketertarikan untuk diteliti. Fakta dilapangan menjadi bukti kinerja BUMN di Indonesia. Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat tingkat profit margin BUMN yang kian tahun semakin menaik. Pada tahun 2014 profit margin BUMN tercatat 7,43 untuk tahun 2015 tercatat 8,10 dan untuk tahun 2016 tercatat 10,01. Hal ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri dalam capaian BUMN. Oleh karena itu profitabilitas juga dapat dikatakan suatu bentuk kabar baik bagi sebuah perusahaan. Tingkat profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Afina, 2015). Dalam penelitian I Putu Sastrawan dan Made Yenni Latrini (2016) disebutkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung lebih cepat dalam menyampikan laporan keuangannya. Dengan demikian perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi tentunya membawa dampak baik dalam *audit report lag* nya.

Disamping itu pula Kementrian BUMN lewat Sekretaris Kementrian yaitu Imam Apriyanto Putro sendiri mencatat total utang BUMN hingga 2017 telah tembus hingga Rp 4.825 triliun. Imam menekankan bahwa utang BUMN tersebut menandakan BUMN yang sedang berkembang. Sebab ketika melakukan ekspansi ataupun menggarap proyek biasanya BUMN menggunakan dana pinjaman untuk pembiayaan. Tingginya tingkat utang pada BUMN tentunya menjadi pertanyaan besar. Dimana ketika BUMN yang sebagian atau keseluruhan sahamnya dikuasai oleh pemerintah berjumlah sangat besar. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008) menyatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Informasi yang baik ini pula dapat dijadikan acuan untuk investor menanamkan investasinya. Sebab pihak manajemen cenderung menunda

penyampaian laporan keuangan berisi berita buruk (Ukago, 2005). Dengan demikian tingkat utang yang ada pada perusahaan berdampak pada *audit report lag* nya.

Berdasarkan uraian tersebut, profitabilitas dan solvabilitas bisa saja sebagai pemicu dalam memperlambat proses penerbitan laporan keuangan. Namun disamping itu juga untuk mempercepat proses penerbitan laporan keuangan sebuah perusahaan juga harus memiliki *corporate governance* yang baik. *Corporate governance* adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan (Robert dan Roger, 2006). Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba dan besar kecilnya laba yang dapat diperoleh merupakan ukuran kesuksesan manajemen dalam mengelola perusahaannya (Munawir, 2012, hlm. 183). Pemisahan kepemilikan serta pengendalian antara manajer dan pemilik menyebabkan terjadinya masalah keagenan. Salah satu mekanisme dari *corporate governance* adalah kepemilikan manajerial. Jensen dan Mecklin (1976) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial adalah mekanisme utama yang dapat digunakan untuk membantu mengendalikan masalah keagenan. Agar konflik dapat berkurang, diperlukan *corporate governance* untuk membatasi wewenang manajer dan menyamakan kepentingan antara manajer dan pemilik. Kepemilikan saham perusahaan oleh manajer yang tinggi akan memiliki posisi yang kuat untuk menguasai terhadap perusahaan (Crutchley dan Hansen, 1989). Diasumsikan bahwa manajer bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Oleh karena itu peran kepemilikan manajerial disinyalir dapat membantu menekan konflik keagenan guna memaksimalkan kinerja *agent* dan *principal*.

Berdasarkan kriteria yang sudah diatur oleh OJK bahwa penyampaian laporan keuangan yang audited tidak boleh lebih dari 90 hari haruslah dipatuhi setiap perusahaan. Namun fakta dilapangan, dari perusahaan BUMN masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan. Hal tersebut masih menjadi permasalahan yang panas untuk melihat sejauh mana pengaruh *audit report lag* yang ada di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian I Putu Sastrawan dan Made Yenni Latrini tahun 2016 yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2010-2013. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yang diteliti yaitu peneliti menggunakan BUMN sektor Non-Keuangan tahun 2014-2016. Selain itu pula peneliti menambahkan variabel lain yaitu kepemilikan manajerial sebagai variabel pendukung yang diperkirakan dapat mempengaruhi *audit report lag* pada BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan solvabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ivena Tiono dan Yulius Jogi pada tahun 2013 dan Faizatul Khoiriyah pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Namun bertentangan pada hasil penelitian tersebut Denny Andriana dan Nada Arina Raspati pada tahun 2015 dan penelitian Tina Vuko dan Marko Cular tahun 2014 yang mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Faizatul Khoiriyah pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa *solvabilitas* memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Namun bertentangan dengan penelitian tersebut yang dilakukan oleh Ni Komang Ari Sumartini dan Ni Luh Sari Widhiyani pada tahun 2014 dan penelitian Mohamad Reza Pourali dan Mahshid Jozi tahun 2013 menyatakan bahwa *solvabilitas* tidak berpengaruh pada *audit report lag*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Audit Report Lag (Studi pada Perusahaan BUMN Non-Keuangan di Indonesia Tahun 2014 – 2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
2. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?

Naomi Sianturi, 2019

PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP AUDIT REPORT LAG (Studi pada Perusahaan BUMN Non-Keuangan Tahun 2014 - 2016)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menguji secara empiris:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Report Lag*
2. Pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Report Lag*
3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Report Lag*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan menambah wawasan dan juga dapat menjadi literatur dalam bidang keuangan, terkhusus berkaitan dengan profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan manajerial dan *audit report lag*. Disamping itu juga dapat menjadi bahan referensi dari penelitian selanjutnya mengenai profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan manajerial dan *audit report lag*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi perusahaan dapat digunakan dalam mengamati hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Bagi investor dan pengguna laporan keuangan dapat digunakan sebagai sumber informasi yaitu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di sebuah perusahaan dengan melihat jangka waktu sebuah perusahaan dapat menyelesaikan audit laporan keuangannya.